

Strategi Integratif Nilai Pendidikan Katolik dalam Menangkal Politik Identitas dan Primordialisme

Herman Yosep Nende Lingge Kumanireng
STPM Santa Ursula Ende, Flores, NTT, Indonesia
Email: hermanyosef100@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i1.92)

Received: 27 Desember 2025 ; Accepted: 27 Januari 2026 ; Published: 31 Januari 2026

Abstrak: Politik identitas dan primordialisme menjadi tantangan serius bagi kohesi sosial di Indonesia, terutama menjelang dan pasca kontestasi politik. Pendidikan Katolik memiliki peran strategis dalam memitigasi dampak negatif fenomena ini melalui internalisasi nilai-nilai injili dan humanisme universal. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi integrasi nilai Katolik dalam kurikulum dan ekosistem sekolah guna membentuk pribadi yang inklusif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui budaya dialog, pendidikan karakter holistik, dan penguatan identitas "Citra Allah", lembaga pendidikan Katolik mampu menjadi laboratorium perdamaian yang menangkai fanatisme sempit. Temuan ini mengindikasikan bahwa dokumen terbaru Vatikan mengenai identitas sekolah Katolik memberikan kerangka kerja yang aplikatif dalam mentransformasi identitas religius menjadi modal sosial kewargaan. Implementasi nilai Ajaran Sosial Gereja secara praktis terbukti efektif dalam membangun daya kritis siswa terhadap narasi politik yang manipulatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pendidikan karakter di sekolah konfesional sebagai pilar stabilitas demokrasi di tengah masyarakat yang majemuk.

Kata kunci: Pendidikan Katolik; Politik Identitas; Primordialisme; Budaya Dialog

Abstract: Identity politics and primordialism pose serious challenges to social cohesion in Indonesia, particularly before and after political contests. Catholic education plays a strategic role in mitigating the negative impacts of these phenomena through the internalization of evangelical values and universal humanism. This article aims to explore strategies for integrating Catholic values into the curriculum and school ecosystem to shape inclusive individuals. The method employed is library research with descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that through a culture of dialogue, holistic character education, and the strengthening of the identity of being "Imago Dei," Catholic educational institutions can serve as laboratories of peace that counter narrow fanaticism. These findings suggest that the latest Vatican document on the identity of Catholic schools provides an applicable framework for transforming religious identity into civic social capital. The practical implementation of the values of Catholic Social Teaching has proven effective in fostering students' critical awareness against manipulative political narratives. Therefore, this study recommends the revitalization of character education in confessional schools as a pillar of democratic stability within a pluralistic society.

Keywords: Catholic Education; Identity Politics; Primordialism; Culture of Dialogue

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi ciri khas sekaligus kekuatan fundamental dalam kehidupan berbangsa. Namun, realitas keberagaman ini ibarat pisau bermata dua; di satu sisi menjadi kekayaan yang tak

ternilai, namun di sisi lain menghadirkan kerentanan terhadap gesekan sosial yang laten. Risiko ini menjadi kian nyata terutama ketika politik identitas digunakan secara pragmatis sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik identitas sering kali menimbulkan eksklusivitas yang memperuncing perbedaan di tengah masyarakat (Fadhlan & Azizah, 2022). Dalam konteks ini, pluralitas yang seharusnya menjadi modal sosial justru berpotensi menjadi sumber konflik yang merusak tatanan demokrasi.

Fenomena politik identitas di Indonesia kerap berakar pada primordialisme, yaitu ikatan emosional yang berlebihan terhadap asal-usul kelompok tertentu. Primordialisme yang tidak terkendali dapat menghambat inklusivitas karena loyalitas terhadap kelompok asal (*in-group*) lebih diutamakan daripada kepentingan nasional yang lebih luas. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi ajang polarisasi, di mana perbedaan dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok (Sapphira & Pitriani, 2025). Hal ini menimbulkan ketegangan sosial yang berulang, terutama dalam momentum kontestasi politik seperti pemilihan umum.

Menguatnya sentimen primordial secara sistematis mengancam sendi-sendi kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berpotensi melemahkan semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, baik melalui jalur pendidikan maupun pendekatan pastoral, yang secara konsisten menekankan nilai moderasi, budaya dialog, serta penghargaan tulus terhadap keberagaman agar pluralitas menjadi kekuatan yang memperkuat persaudaraan.

Studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi peran strategis lembaga pendidikan dalam meredam konflik identitas. Misalnya, penelitian Maulana (2023) menyoroti efektivitas pendidikan multikultural, sementara Lapsley dan Kelley (2022) menggarisbawahi pentingnya pembentukan karakter berbasis nilai iman di sekolah konfesional. Selain itu, Rahman dan Ahmad (2022) menekankan bahwa literasi moderasi beragama di lembaga pendidikan menjadi kunci krusial dalam menghadapi radikalisme yang sering kali menumpang pada narasi politik identitas yang provokatif.

Meskipun diskursus mengenai pendidikan toleransi sudah banyak dilakukan, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur saat ini. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendidikan inklusi secara umum atau kebijakan kurikulum nasional di sekolah negeri. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek sosiologis dan pedagogis, namun belum secara mendalam mengeksplorasi dimensi teologis dan politik, terutama dalam mengkaji hubungan antara prinsip persaudaraan universal dari Paus Fransiskus (2020) dengan tantangan primordialisme di Indonesia. Masih sangat sedikit penelitian yang membedah bagaimana dokumen instruksi terbaru Vatikan, "*The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue*" (Paus Fransiskus, 2020) diimplementasikan secara praktis sebagai antitesis terhadap primordialisme lokal.

Di tengah tantangan sosiopolitik ini, pendidikan Katolik memiliki mandat teologis sekaligus sosiologis yang sangat kuat. Pesan Paus Fransiskus (2020) dalam *Fratelli Tutti* menyerukan kepada lembaga pendidikan Katolik untuk menghilangkan batas-batas identitas yang eksklusif dan mempromosikan persaudaraan universal. Hal ini selaras dengan arahan Vatikan (2022) yang menekankan bahwa identitas Katolik harus menjadi fondasi bagi terciptanya budaya dialog yang otentik. Pendidikan Katolik dipanggil untuk tidak hanya mendidik penganut agama yang taat, tetapi juga warga negara yang inklusif dan solutif terhadap permasalahan bangsa melalui internalisasi nilai *Imago Dei* (Citra Allah) yang mengakui kesetaraan martabat setiap manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model integrasi nilai pendidikan Katolik yang inovatif dengan menggabungkan visi *Fratelli Tutti* (Paus Fransiskus, 2020) dan "*The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue*" (Education, 2022) sebagai landasan teologis untuk mempromosikan inklusivitas politik. Model ini berpijak pada kerangka konseptual yang memadukan teori pendidikan karakter Thomas Lickona, prinsip teologi sosial Katolik, dan teori kohesi sosial Robert Putnam. Secara operasional, pendekatan Lickona digunakan untuk menganalisis transformasi nilai toleransi menjadi karakter utuh (kognitif,

afektif, dan psikomotorik), sementara teori Putnam diaplikasikan untuk membedah bagaimana sekolah Katolik membangun modal sosial (*bridging social capital*) yang menjembatani sekat identitas di tengah polarisasi politik.

Melalui model ini, penelitian bermaksud mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Kristiani dapat menjadi jembatan dialogis (*dialogue of life and action*) yang efektif untuk menetralkan sentimen sektarian di kalangan generasi muda. Integrasi nilai tersebut diharapkan dapat membentuk habitus baru bagi peserta didik agar memiliki daya kritis dalam memilah informasi politik yang manipulatif serta memperkuat akar identitas religius yang inklusif. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan menjadi referensi praktis-pastoral bagi pengelola sekolah Katolik dalam merevitalisasi visi dan misi mereka sebagai perekat sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dipecahkan (Snyder, 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada eksplorasi konseptual dan teoretis mengenai integrasi nilai-nilai teologis ke dalam ranah sosiopolitik. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer yang mencakup dokumen resmi Gereja Katolik, khususnya instruksi Vatikan terbaru berjudul "*The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue*" (Education, 2022) dan Eksiklik *Fratelli Tutti* (Paus Fransiskus., 2020) sebagai dasar nilai persaudaraan universal, serta data sekunder yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi baik nasional maupun internasional, buku teks tentang politik identitas, serta laporan penelitian sosiologi pendidikan yang terbit dalam rentang waktu 2022–2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data digital seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan *DOAJ* menggunakan kata kunci "Pendidikan Katolik", "Politik Identitas", "Primordialisme", dan "Budaya Dialog". Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur ditetapkan pada terbitan tahun 2022 hingga 2025, membahas kaitan antara nilai agama dan kohesi sosial, serta berfokus pada konteks masyarakat plural atau Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan model analisis konten (*content analysis*). Proses analisis mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh (Miles et al., 2020) yang meliputi reduksi data untuk menyaring informasi nilai-nilai spesifik pendidikan Katolik, penyajian data (*data display*) untuk menyusun temuan konsep secara sistematis, serta penarikan kesimpulan guna merumuskan sintesis baru berupa model integrasi nilai yang dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan. Untuk menjaga objektivitas dan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan mengomparasikan dokumen internal Gereja dengan realitas sosiopolitik dalam literatur ilmiah serta melakukan audit referensi untuk memastikan kemutakhiran data yang digunakan (Sugiyono, 2023).

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Politik Identitas dan Tantangan Demokrasi

Politik identitas diprediksi tetap menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena potensi fragmentasi sosial yang ditimbulkannya secara masif. Penggunaan identitas keagamaan dan etnis sebagai instrumen mobilisasi massa cenderung menciptakan garis demarkasi yang tegas antara kelompok "kita" dan "mereka", yang pada akhirnya mengikis kohesi nasional secara perlahan (Hutapea, 2023). Kondisi ini menciptakan residu konflik yang berkepanjangan di tingkat akar rumput, di mana ketegangan antarkelompok sering kali menetap jauh setelah kontestasi politik atau pemilu berakhir.

Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya literasi politik dan digital yang membuat lapisan masyarakat tertentu mudah terjebak dalam sentimen kelompok serta penyebaran hoaks bermuatan SARA. Ketidakmampuan kolektif dalam membedakan antara aspirasi politik yang sehat dan manipulasi identitas yang eksploitatif menyebabkan pemilih terjebak dalam fanatisme sempit yang menutup ruang diskusi (Askana, 2024). Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi ajang dialektika ideologi dan program kerja berubah menjadi medan pertempuran emosional yang irasional dan sangat kontraproduktif bagi kemajuan demokrasi.

Primordialisme yang akut dalam praktik politik identitas di Indonesia juga mencerminkan kegagalan pendidikan politik dalam mentransformasikan identitas privat menjadi identitas kewargaan yang inklusif. Menurut Sapphira dan Pitriani (2025), keterikatan emosional yang berlebihan pada asal-usul sering kali meniadakan nalar kritis, sehingga kebijakan publik tidak lagi dinilai berdasarkan objektivitas atau rasionalitas, melainkan berdasarkan kesamaan latar belakang primordial. Hal ini secara sistematis menghambat lahirnya kepemimpinan yang meritokratis dan berorientasi pada kesejahteraan umum (*bonum commune*), karena loyalitas kelompok dianggap lebih utama daripada kompetensi.

Secara sosiologis, tantangan demokrasi yang berat ini memerlukan intervensi institusional yang kuat, terutama dari sektor pendidikan, untuk melakukan dekonstruksi terhadap narasi kebencian dan segregasi. Tanpa adanya upaya sistematis dan terstruktur untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang keberagaman, politik identitas akan terus menjadi "bom waktu" yang mengancam stabilitas nasional dan integrasi sosial (Fadhlan & Azizah, 2022). Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus hadir sebagai penawar racun sektarianisme melalui kurikulum yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Politik identitas sering kali memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk menyulut kecemburuan sosial antarkelompok identitas. Narasi-narasi yang memojokkan kelompok minoritas atau mengunggulkan satu kelompok mayoritas secara berlebihan digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial seperti korupsi atau ketimpangan pembangunan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi benteng utama agar generasi muda memiliki kekritisian dalam melihat motif di balik narasi-narasi populisme yang memecah belah tersebut.

Polarisasi yang dihasilkan oleh politik identitas juga berdampak pada rusaknya etika berkomunikasi di ruang siber, di mana *cyber-bullying* dan pembunuhan karakter berbasis identitas menjadi hal yang lumrah. Hal ini menciptakan iklim ketakutan bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, sehingga menurunkan kualitas kebebasan berpendapat yang merupakan pilar demokrasi. Institusi pendidikan Katolik, dalam hal ini, memiliki peran krusial untuk mengembalikan nilai-nilai kesantunan dan penghargaan terhadap martabat pribadi dalam diskursus publik.

Kecenderungan politik identitas untuk menumbuhkan eksklusivisme juga berisiko melemahkan rasa memiliki terhadap negara kesatuan. Ketika individu merasa bahwa identitas kelompoknya lebih tinggi daripada identitas sebagai warga negara Indonesia, maka semangat gotong royong dan solidaritas nasional akan luntur. Tantangan ini menuntut sekolah-sekolah untuk merevitalisasi pendidikan kewarganegaraan yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal, guna menjamin bahwa perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.

Sebagai penutup bagian ini, kompleksitas politik identitas menuntut sinergi antara kebijakan negara dan peran aktif lembaga keagamaan dalam mendidik umatnya. Pendidikan Katolik yang menekankan pada keterbukaan dan dialog menjadi antitesis yang sangat relevan bagi radikalisme identitas. Dengan membekali siswa dengan pemahaman teologis yang moderat dan sosiologis yang luas, diharapkan tantangan demokrasi ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia di masa depan.

B. Nilai Dasar Pendidikan Katolik

Pendidikan Katolik berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, martabat manusia, dan solidaritas yang menjadi pilar utama dalam seluruh struktur kurikulumnya. Prinsip martabat manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi dan nilai intrinsik yang sama karena diciptakan menurut gambar Allah, tanpa memandang latar belakang primordial seperti suku, ras, atau golongan. Pemahaman teologis ini menjadi antitesis langsung terhadap segala bentuk diskriminasi dan eksklusi sosial yang sering kali dilegalkan melalui narasi politik identitas (Manullang, 2024). Nilai-nilai ini bukan sekadar dogma internal agama, melainkan bertransformasi menjadi etika universal yang mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

Fokus utama dari institusi pendidikan Katolik adalah pembentukan karakter moral-spiritual yang kuat guna menghadapi berbagai disrupsi moral di era kontemporer, termasuk fragmentasi sosial. Melalui proses *formatio* yang berkelanjutan, siswa diajak untuk memiliki kedalaman batin dan kemandirian berpikir yang melampaui egoisme kelompok atau sentimen sektarian (Bhakti, 2024). Karakter yang berakar pada nilai injili ini menjadi fondasi penting agar lulusannya tidak mudah terombang-ambing oleh arus populisme maupun politik identitas yang kerap mengeksploitasi kerapuhan emosional individu demi kepentingan elektoral sesaat.

Internalisasi nilai-nilai dasar ini juga mengacu pada tradisi intelektual Gereja yang menekankan harmoni antara iman dan akal budi (*fides et ratio*). Pendidikan Katolik tidak hanya menyentuh aspek afektif, tetapi juga mendorong siswa untuk menggunakan daya kritis mereka dalam menyaring informasi dan narasi yang provokatif di ruang publik. Dengan rasio yang tercerahkan oleh iman, siswa mampu melihat kemanusiaan yang universal di balik setiap label identitas yang sering kali digunakan untuk memecah belah (Tanggur, 2024). Dengan demikian, iman Kristiani diwujudkan dalam tindakan intelektual dan nyata yang mendukung kebaikan bersama (*bonum commune*) di tengah masyarakat yang majemuk.

Dokumen "*The Identity of the Catholic School*" (Education, 2022) menegaskan bahwa pendidikan Katolik harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap setia pada jati dirinya sebagai institusi yang melayani. Identitas Katolik ini tidak diartikan sebagai eksklusivitas yang memisahkan diri, melainkan sebagai kesiapan untuk melayani semua orang tanpa terkecuali demi kemuliaan Allah melalui pelayanan pendidikan. Melalui nilai solidaritas yang diajarkan, siswa memahami bahwa keberhasilan pribadi dan prestasi akademik harus memberikan dampak positif bagi sesama, terutama mereka yang tersisih atau menjadi korban dari sistem sosial yang tidak adil.

Dalam konteks menghadapi primordialisme, nilai dasar pendidikan Katolik menekankan pada "persaudaraan universal" yang melintasi batas-batas geografis dan sosiologis. Pendidikan ini mengajarkan bahwa setiap manusia adalah sesama yang harus dikasihi, sebuah konsep yang sangat relevan untuk menetralkan kebencian berbasis identitas. Ketika nilai ini menyerap ke dalam kesadaran siswa, mereka akan memandang keberagaman di Indonesia bukan sebagai ancaman yang harus diseragamkan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dijaga demi keutuhan bangsa. Hal ini menjadikan sekolah Katolik sebagai garda depan dalam mempromosikan moderasi beragama dan kewargaan yang inklusif.

Sebagai pilar terakhir, pendidikan Katolik mengedepankan nilai kejujuran dan keberanian moral dalam membela keadilan. Siswa dilatih untuk berani menyatakan kebenaran di tengah maraknya hoaks dan manipulasi identitas yang merusak tatanan demokrasi. Karakter yang holistik ini memastikan bahwa lulusan sekolah Katolik tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kepekaan nurani untuk menolak segala bentuk politisasi agama. Pada akhirnya, nilai-nilai dasar ini membentuk manusia yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi agen transformasi yang membawa kedamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

C. Strategi Integrasi Nilai

1. Pendidikan Multikultural Berbasis Ajaran Sosial Gereja (ASG)

Sekolah Katolik mengintegrasikan konten multikultural secara sistematis melalui pembelajaran Agama Katolik yang menekankan konsep manusia sebagai *Imago Dei* atau Citra Allah. Keyakinan teologis ini memberikan landasan filosofis yang kokoh bahwa setiap manusia, terlepas dari perbedaan suku, ras, maupun agamanya, memiliki martabat dan kemuliaan yang setara karena berasal dari Sang Pencipta yang satu. Nilai ini secara fundamental meniadakan segala bentuk superioritas satu kelompok atas kelompok lain, sehingga menjadi instrumen teologis yang sangat efektif dalam menangkal bibit-bibit primordialisme yang sering kali memicu perpecahan (Rahman & Ahmad, 2022).

Implementasi nyata dari strategi ini tercermin dalam program "Live-In Sosial" yang dijalankan secara konsisten oleh SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya. Melalui program ini, para siswa terjun langsung dan berinteraksi dengan komunitas pedesaan yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda, yang menurut hasil evaluasi internal sekolah, terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran akan martabat manusia melampaui sekat-sekat identitas (SMA Katolik St. Louis, 2023). Sejalan dengan itu, Yayasan Tarakanita melalui modul "Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan" (KPKC) membekali siswa dengan kemampuan analisis kritis terhadap politik identitas, memandangnya sebagai pelanggaran terhadap keadilan sosial dan prinsip solidaritas dalam Ajaran Sosial Gereja (Manullang, 2024).

Implementasi Ajaran Sosial Gereja (ASG) dalam kelas multikultural dilakukan dengan membawa isu-isu kemanusiaan global dan lokal ke dalam ruang diskusi siswa secara kritis. Siswa diajak untuk merefleksikan prinsip-prinsip utama ASG, terutama prinsip subsidiaritas dan solidaritas, dalam menanggapi berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi, adalah tanggung jawab moral bersama yang melintasi batas-batas identitas keagamaan (Manullang, 2024).

Prinsip *Bonum Commune* atau Kesejahteraan Umum diajarkan sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan politik dan sosial warga negara. Dalam konteks menghadapi politik identitas, nilai ini membantu siswa untuk memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Dengan memahami bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai secara parsial, siswa didorong untuk menjadi pribadi yang inklusif dalam menyusun solusi atas permasalahan kemasyarakatan yang kompleks.

Selain melalui kurikulum formal di dalam kelas, integrasi nilai multikultural ini terwujud secara nyata dalam perayaan-perayaan kebangsaan dan apresiasi kebudayaan di lingkungan sekolah. Sekolah Katolik diposisikan sebagai laboratorium sosial di mana simbol-simbol keberagaman etnis dan budaya tidak hanya ditoleransi, tetapi dihargai dan dirayakan sebagai kekayaan ilahi, bukan sebagai ancaman terhadap iman. Dengan membangun atmosfer yang inklusif dan apresiatif, sekolah Katolik membentuk pola pikir siswa agar selalu mengedepankan persaudaraan sejati di atas perbedaan-perbedaan yang sifatnya aksidental (Bhakti, 2024).

Strategi integrasi ini terbukti mampu menciptakan daya tahan (*resilience*) yang kuat pada diri siswa terhadap narasi politik identitas yang sering kali bersifat manipulatif dan merusak. Ketika siswa memiliki pemahaman mendalam bahwa identitas mereka sebagai warga negara dan sebagai pribadi manusia adalah setara baik di mata Tuhan maupun di hadapan hukum, mereka akan menjadi lebih sulit diprovokasi oleh sentimen kebencian. Pendidikan multikultural berbasis ASG ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspek dogmatis ajaran iman dengan realitas kewarganegaraan di Indonesia yang berbhinneka.

Dalam menghadapi era disrupsi informasi, pendidikan multikultural di sekolah Katolik juga mencakup literasi media yang berlandaskan pada nilai kejujuran dan kasih. Siswa dilatih untuk melakukan filtrasi terhadap pesan-pesan politik yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi, serta berani menyuarakan kebenaran di tengah arus polarisasi. Hal ini selaras

dengan panggilan untuk menjadi "garam dan terang dunia," di mana keterlibatan sosial siswa harus memberikan dampak positif yang mempersatukan, bukan menceraikan-berai.

Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya "Etika Perjumpaan" yang melampaui sekadar koeksistensi pasif. Melalui kolaborasi dalam proyek-proyek lintas budaya di sekolah, siswa belajar untuk menghargai perspektif orang lain yang berbeda tanpa harus mengorbankan identitas iman mereka sendiri. Proses ini menumbuhkan kedewasaan beragama yang inklusif, di mana kekristenan dipahami sebagai keterbukaan terhadap penderitaan dan harapan sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya.

Strategi integrasi nilai berbasis ASG memberikan kontribusi nyata bagi penguatan karakter bangsa yang toleran. Sekolah Katolik tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga warga negara yang memiliki komitmen moral tinggi terhadap persatuan nasional. Dengan menjadikan nilai-nilai injili sebagai basis pendidikan multikultural, sekolah Katolik turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman disintegrasi yang dipicu oleh sentimen primordialisme dan politik identitas.

2. Budaya Dialog dan Keterbukaan

Sesuai dengan dokumen Vatikan terbaru berjudul "Congregation for Catholic Education" (2022), sekolah Katolik harus bertransformasi menjadi "rumah yang terbuka" yang mengedepankan budaya dialog sebagai identitas utamanya. Inisiatif "Canisius Cultural Night" di Kolese Kanisius Jakarta menjadi bukti nyata bagaimana "Dialog Karya" diimplementasikan melalui pertemuan rutin antara tokoh lintas iman dan para siswa (Humas Kanisus, 2023). Fenomena serupa tampak di Maluku, di mana institusi pendidikan Katolik pasca-konflik bertransformasi menjadi ruang perjumpaan (*melting pot*) bagi pelajar dari beragam keyakinan untuk memulihkan kohesi sosial melalui aktivitas ekstrakurikuler bersama. Praktik lapangan ini memperkuat argumen sosiologis tentang pentingnya membangun *bridging social capital* guna menetralkan sentimen primordial di level akar rumput (Maulana, 2023). Dialog dalam konteks ini bukan sekadar pertukaran kata-kata secara superfisial, melainkan sebuah sikap dasar untuk mendengarkan dengan empati dan menghormati kebenaran serta martabat yang ada pada orang lain. Keterbukaan ini menjadi kunci krusial bagi sekolah Katolik agar tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi bermakna di tengah arus polarisasi sosiopolitik yang kian menguat di Indonesia.

Integrasi nilai ini dilakukan secara konkret melalui "Dialog Kehidupan," di mana sekolah secara sengaja menciptakan ruang untuk interaksi alami antara siswa, guru, dan staf dari berbagai latar belakang keyakinan. Di lingkungan sekolah Katolik, keberadaan rekan-rekan non-Katolik tidak boleh dipandang sebagai beban atau sekadar bentuk toleransi pasif, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ekosistem pembelajaran yang memperkaya perspektif. Melalui perjumpaan harian yang otentik ini, prasangka-prasangka primordial yang sering dibawa dari lingkungan luar dapat luruh dan digantikan oleh rasa saling pengertian yang tulus.

Selain dialog kehidupan, sekolah Katolik juga menerapkan "Dialog Karya" sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengabdian masyarakat dan kurikulum berbasis proyek. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proyek sosial lintas agama yang bertujuan untuk mengatasi masalah konkret di masyarakat, seperti penanggulangan dampak bencana alam atau gerakan pelestarian lingkungan hidup. Kolaborasi dalam karya nyata ini menjadi bukti empiris bahwa perbedaan iman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar (Maulana, 2023).

Sekolah Katolik berperan dalam mengembangkan "Dialog Refleksi Teologis" yang bersifat inklusif, di mana siswa diajak untuk menemukan titik temu etis dari berbagai tradisi agama dalam menghadapi isu-isu keadilan sosial. Hal ini penting untuk membentengi siswa dari klaim kebenaran sepihak yang sering dieksploitasi dalam politik identitas. Dengan memahami nilai-nilai universal yang diajarkan oleh berbagai keyakinan, siswa akan memiliki landasan teologis yang moderat dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi sektarian (Tanggur, 2024).

Budaya dialog ini pada akhirnya melahirkan sebuah habitus atau kebiasaan baru di kalangan siswa untuk selalu mengedepankan musyawarah dan keterbukaan dalam menyelesaikan setiap konflik atau perbedaan pendapat. Dengan menjadikan sekolah sebagai "laboratorium" atau medan latihan dialog, pendidikan Katolik sedang menyiapkan generasi masa depan yang mampu menjadi penengah (*bridge builders*) di tengah masyarakat yang terbelah. Dialog diposisikan sebagai strategi preventif yang paling ampuh untuk meredam potensi konflik horisontal yang kerap dipicu oleh manipulasi identitas primordial.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, budaya dialog di sekolah Katolik juga berfungsi sebagai implementasi nyata dari penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi kebhinekaan global. Siswa diajarkan untuk bangga pada identitas Katolik mereka tanpa harus merasa superior atau merendahkan identitas lain. Keseimbangan antara identitas religius yang kokoh dan keterbukaan sosial yang luas inilah yang menjadi jawaban atas tantangan primordialisme sempit yang mengancam persatuan nasional (Manullang, 2024).

Penerapan budaya dialog ini juga mencakup penggunaan teknologi digital sebagai sarana perjumpaan yang positif, bukan medan caci maki. Sekolah Katolik mendorong siswa untuk menjadi duta perdamaian di media sosial dengan menyebarkan konten-konten yang menyejukkan dan mempromosikan persaudaraan universal sesuai semangat *Fratelli Tutti*. Hal ini krusial mengingat politik identitas modern banyak beroperasi melalui algoritma digital yang cenderung mengkotak-kotakkan masyarakat ke dalam ruang gema (*echo chambers*) yang tertutup.

Transformasi sekolah Katolik menjadi rumah dialog menuntut komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan yayasan hingga tenaga kependidikan. Keterbukaan yang dijalankan harus bersifat tulus dan tanpa pretensi proselytisme (pemaksaan agama), melainkan murni sebagai wujud kesaksian kasih. Dengan demikian, pendidikan Katolik tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara kognitif, tetapi juga pribadi yang memiliki kelenturan sosial untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk.

3. Internalisasi Karakter Kristiani yang Holistik

Pendidikan holistik di sekolah Katolik tidak hanya mengejar prestasi akademik yang kompetitif, tetapi juga memprioritaskan pengembangan empati sosial sebagai respons atas fragmentasi masyarakat. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sistem *Cura Personalis* yang diterapkan oleh sekolah-sekolah Jesuit, salah satunya Kolese De Britto Yogyakarta, berhasil mendalami karakter siswa secara holistik. Penggunaan metode *Examen Conscientiae* sebagai sarana refleksi rutin terbukti melatih independensi berpikir siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi berbasis identitas (Ignasian, 2022). Data empiris dari Britto (2023) memperkuat argumen ini, di mana tercatat peningkatan drastis dalam toleransi siswa pasca-pelatihan karakter hingga mencapai angka 90%. Secara teoretis, fenomena ini menunjukkan bahwa sinergi moral yang diusung Lickona memberikan dampak konkret dalam meminimalisir sentimen sektarian di kalangan pelajar. Pendekatan ini memandang siswa sebagai pribadi utuh yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara terintegrasi. Dalam praktiknya, kurikulum yang seimbang mengajarkan bahwa kepandaian tanpa integritas moral hanya akan menjadi alat untuk menindas orang lain atau melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Fokus pada "pembentukan manusia seutuhnya" ini menjadi antitesis bagi pragmatisme politik yang seringkali mengabaikan etika demi pencapaian tujuan jangka pendek.

Data empiris menunjukkan bahwa siswa di sekolah Katolik yang secara konsisten menerapkan program spiritualitas, seperti retreat dan rekoleksi, memiliki tingkat toleransi yang signifikan lebih tinggi dibandingkan lingkungan yang hanya berfokus pada nilai kognitif. Dalam beberapa laporan evaluasi pendidikan, tercatat peningkatan hingga 90% dalam kemampuan siswa beradaptasi dan menghargai perbedaan setelah mengikuti program internalisasi karakter secara intensif (Britto, 2023). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter yang terencana dan berbasis nilai injili memiliki dampak terukur dalam meredam prasangka sosial yang sering dipicu oleh isu primordialisme.

Internalisasi nilai ini juga diwujudkan melalui prinsip *cura personalis* atau pendampingan personal, di mana setiap siswa dihargai dalam keunikan dan martabatnya yang tak terulangi. Sikap guru yang menerima siswa tanpa syarat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun agama, menjadi model konkret bagi siswa untuk melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Karakter Kristiani yang holistik ini menumbuhkan kerendahan hati intelektual untuk mengakui bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu individu atau kelompok saja, melainkan harus dicari bersama dalam semangat persaudaraan (Tanggur, 2024).

Pendidikan holistik ini menekankan pentingnya literasi etis dalam mengonsumsi informasi di era digital, di mana politik identitas seringkali disebarkan melalui narasi yang bias. Siswa dilatih untuk memiliki "suara hati yang jernih" agar mampu membedakan antara kecintaan pada identitas diri dan kebencian pada identitas luar. Dengan memperkuat aspek afektif, pendidikan Katolik memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki siswa digunakan untuk membangun jembatan persahabatan, bukan tembok pemisah antar-etnis maupun antar-golongan (Bhakti, 2024).

Proses internalisasi karakter ini juga melibatkan keterlibatan aktif dalam komunitas melalui program pelayanan sosial yang menyentuh realitas kemiskinan dan ketidakadilan. Melalui pertemuan langsung dengan mereka yang "berbeda" secara ekonomi maupun keyakinan, abstraksi teologis tentang kasih berubah menjadi tindakan nyata yang menghancurkan sekat-sekat primordial. Hal ini sejalan dengan visi *Fratelli Tutti* yang mendorong setiap institusi pendidikan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang mampu melampaui batas-batas geografis dan identitas demi kemanusiaan universal.

Pada akhirnya, lulusan sekolah Katolik diharapkan muncul sebagai pribadi yang berintegritas dan mampu menjadi agen perdamaian (*agent of peace*) di tengah masyarakat yang rentan terpolarisasi. Dengan karakter yang holistik, mereka memiliki daya kritis untuk menolak manipulasi politik identitas sekaligus memiliki kekuatan moral untuk mempromosikan primordialisme yang positif. Primordialisme positif ini dipahami sebagai kecintaan pada asal-usul dan tradisi yang justru memacu semangat pengabdian pada bangsa secara inklusif, bukan sebagai dalih untuk menutup diri atau membenci pihak yang berbeda.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa integrasi nilai pendidikan Katolik bukan merupakan upaya konstruksi eksklusivisme religius, melainkan sebuah strategi penguatan identitas Kristiani yang inklusif dan adaptif terhadap realitas pluralisme. Temuan menunjukkan bahwa revitalisasi kurikulum berbasis antropologi teologis *Imago Dei* dan Ajaran Sosial Gereja (ASG) berperan sebagai instrumen transformasi identitas siswa menjadi modal sosial (*social capital*) yang efektif dalam memitigasi arus primordialisme serta politik identitas. Sekolah Katolik dalam konteks ini berfungsi sebagai "laboratorium perdamaian" yang menginstitutionalisasi budaya dialog baik dialog kehidupan maupun dialog karya untuk melampaui fragmentasi sektarian.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa strategi *formatio* yang holistik bertindak sebagai antitesis terhadap polarisasi sosial akibat kontestasi politik. Dengan mensinergikan kearifan lokal (*local wisdom*) dan persaudaraan semesta (*universal fraternity*), lembaga pendidikan Katolik memegang peran strategis dalam merawat kohesi nasional dan kualitas demokrasi di Indonesia. Implikasi praktisnya, konsistensi penerapan prinsip *cura personalis* dan keterbukaan terhadap alteritas ("yang lain") menjadi prasyarat fundamental bagi relevansi pendidikan Katolik sebagai agen perubahan sosial yang mampu mereduksi risiko polarisasi di masa depan.

Penelitian ini terbatas pada lingkup internal institusi pendidikan Katolik, sehingga generalisasi temuan dalam spektrum pendidikan berbasis agama lain masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Penelitian masa depan diharapkan dapat melakukan studi komparatif lintas iman guna mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai universal dalam berbagai tradisi

keagamaan dapat berkonvergensi dalam mereduksi segregasi sosial. Selain itu, diperlukan penelitian longitudinal untuk mengukur efektivitas jangka panjang dari prinsip *cura personalis* terhadap perilaku politik alumni di ruang publik. Penggunaan metode campuran (*mixed-methods*) dengan melibatkan variabel eksternal seperti pengaruh media sosial dan lingkungan keluarga juga sangat disarankan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembentukan identitas inklusif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Askana Fikriana, M. M. A. (2024). Tantangan dan upaya penanganan politik identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 4(1).
- Bhakti, A. S. (2024). Mengokohkan fondasi pendidikan Katolik di era kontemporer: Ketangguhan, kesadaran, dan keadilan sosial. *Palangka Raya: STIPAS Tahasak Danum Pambelum*.
- Britto., S. K. De. (2023). *Laporan kegiatan rekoleksi dan pembentukan karakter Cura Personalis*. Yogyakarta: SMA Kolese De Britto.
- Congregation for Catholic Education. (2022). The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue. *Vatican City*.
- Education, C. for C. (2022). *The identity of the Catholic school for a culture of dialogue: Instruction for the Catholic education*. Vatican City: Holy See.
- Fadhlan, A. N., & Azizah, N. (2022). Politik identitas di Pilkada (Studi kasus: Hubungan aksi 212). *Jurnal Communitarian*, 4(2).
- Humas Kanisus. (2023). *Laporan tahunan kegiatan kultural dan dialog lintas iman Kolese Kanisius*. Jakarta: SMA Kolese Kanisius.
- Hutapea, E. K., dkk. (2023). Tantangan dan upaya penanganan politik identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Ignasian, S. (2022). *Pedoman kurikulum pendidikan karakter bagi sekolah-sekolah Jesuit di Indonesia*. Jakarta: Provindo.
- Lapsley, D., & Kelley, K. (2022). On the Catholic identity of students and schools: Value propositions for Catholic education. *Journal of Catholic Education*, 25(1).
- Manullang, J. M. (2024). Konsep nilai sila keadilan sosial dalam pendidikan Katolik. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Maulana, D. F., dkk. (2023). Pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural: Tinjauan praktis di Sekolah Menengah Pertama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Paus Fransiskus. (2020). *Ensiklik Fratelli Tutti: Tentang persaudaraan dan persahabatan sosial*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Rahman, A., & Ahmad, S. (2022). Pendidikan multikultural dalam menangkal primordialisme di era digital. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1).
- Sapphira, T. A., & Pitriani, P. (2025). Primordialisme dalam pemilihan presiden dan caleg bagi pemilih kritis. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1).
- SMA Katolik St. Louis. (2023). *Laporan evaluasi tahunan program Live-In sosial dan pendidikan multikultural*. Surabaya: SMAK St. Louis 1.
- Snyder, H. (2022). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tanggur, F. S. (2024). Implementasi pendidikan Katolik menurut dokumen identitas sekolah Katolik untuk budaya dialog. *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik*.